



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# RENSTRA



# RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPM & PTSP )**

**JLN. SETIA BUDI NO. 15 PADANG TELP. (0751) 811341, FAX. (0751) 811342**

**<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>**

**PADANG**

## Pengantar

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. .

Padang, 1 Februari 2016  
Kepala BKPM&PPT  
Provinsi Sumatera Barat



**MASWAR DEDI. AP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740618 199311 1 001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

---

**B**adan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat.

## B. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPM & PPT, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 diatas dan terakhir sesuai dengan Peraturan Daeran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah status menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari;
  - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  - Seksi Pemberdayaan Usaha;
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
  - Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;

- Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
  - Seksi Pelayanan Perizinan I;
  - Seksi Pelayanan Perizinan II;
  - Seksi Pelayanan Non Perizinan;
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri dari:
  - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
  - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

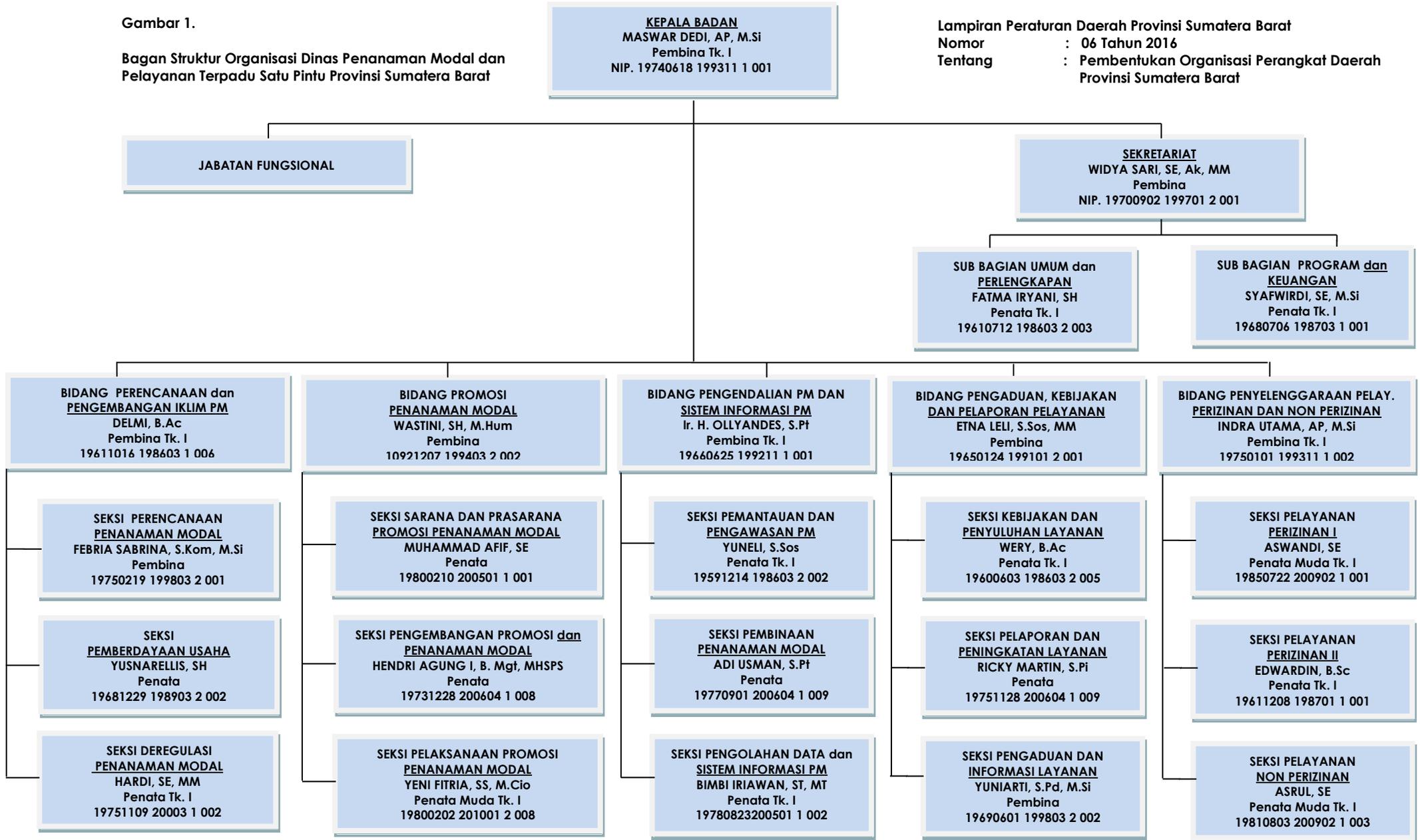
Bagan struktur organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada lampiran I.



Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

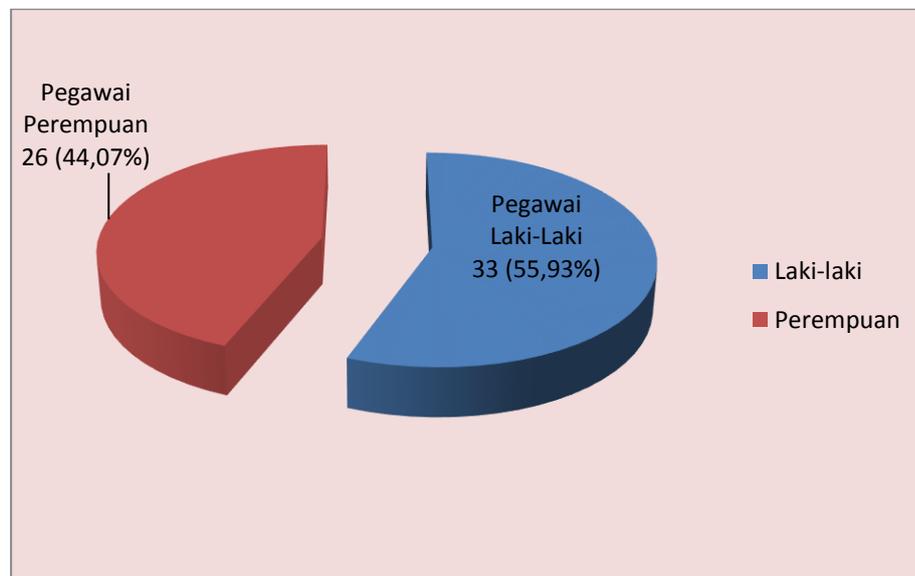
Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 06 Tahun 2016  
 Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat



### C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 59 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang (44,07%) perempuan dan 33 orang (55,93%) laki-laki. Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

**Gambar 2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**



Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

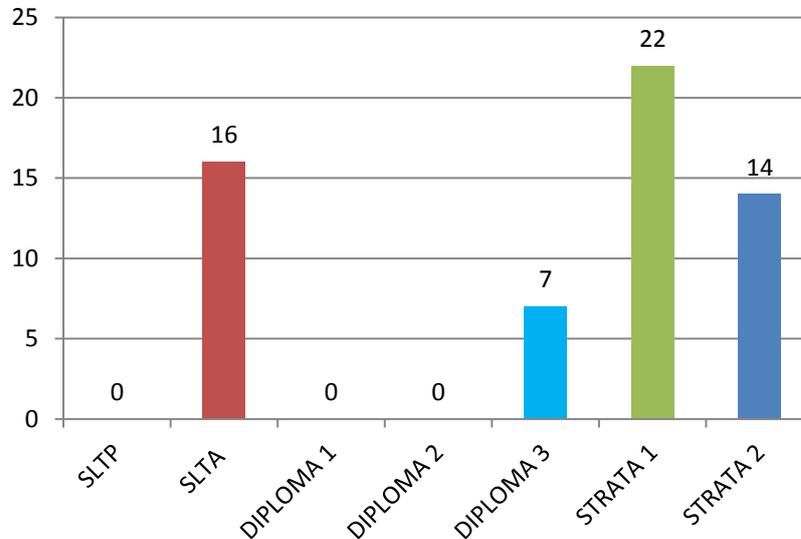
**Tabel 1.1.**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM & PPT**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	16	21,82%
3	DIPLOMA III/ D-3	7	12,73%
4	STRATA 1	22	40,00%
5	STRATA 2	14	25,45%
6	STRATA 3	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 65,45% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 25,45% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

**Gambar 3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**



*Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat*

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.2.**  
**Daftar Golongan Pegawai BKPM & PPT**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**

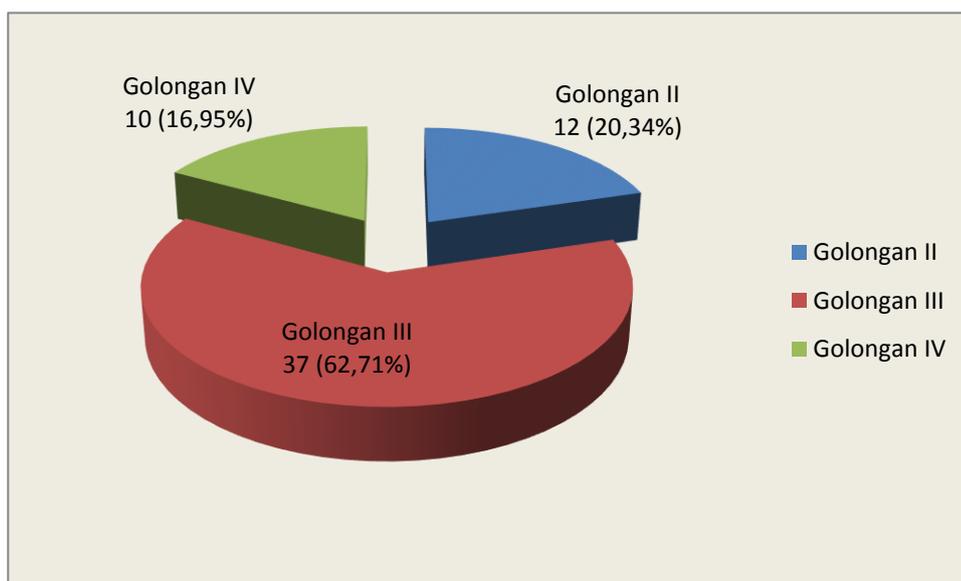
NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	12	20,34%
3	Golongan III	37	62,71%
4	Golongan IV	10	18,18%
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 62,71% pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA.

Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu per golongan:

**Gambar 4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**



*Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat*

#### **D. ANGGARAN**

Pelaksanaan Program Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.838.488.705,- (Perubahan anggaran) yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.308.747.705,-**
  - Gaji dan Tunjangan : Rp. 3.144.161.727,-
  - Tambahan Penghasilan PNS: Rp. 1.146.075.978,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 4.529.741.000,-**  
Terdiri dari:
  - Belanja langsung pokok 5 Program, 27 kegiatan.
  - Belanja langsung urusan 2 Program, 22 kegiatan.

## E. IVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Koodinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 sebesar Rp. 3.022.926.221,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.022.926.221,-.

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Daftar Aset BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Per Desember 2016**

<b>N o</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
<b>I.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah Tanah	-
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 7 unit 1 unit 417 unit 11 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	21 Buah 3 Unit
<b>II.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset tidak berwujud	-
2	Aset tidak bermanfaat	-

Sumber : Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) BKPM & PPT 2016

## F. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara profesional.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang pelayanan perizinan, ruangan bidang perencanaan, ruangan pengendalian, ruangan pengaduan dan ruangan bidang promosi. Selain itu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat yang dipergunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

**Tabel 1.4.**  
**Daftar Kendaraan Dinas**  
**BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Sepeda Motor	Honda	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
3	Mobil	Kijang Innova	Operasional Kepala Badan
4	Mobil	Honda Accord	Operasional Kepala Badan
5	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional Administrasi

6	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
7	Mobil Double Gardan	Mitsubishi	Operasional Administrasi

Sumber : Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) BKPM & PPT 2016

## G. INFORMASI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah khusus pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**  
**BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2011-2016**

TAHUN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	TOTAL	KETERANGAN
2011	3	-	3	3 Izin
2012	4	-	4	4 Izin
2013	631	13	644	631 Izin; 13 Rekomendasi
2014	555	7	562	555 Izin; 7 Rekomendasi
2015	665	20	685	665 Izin; 20 Rekomendasi
2016	1.098	7	1.105	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
<b>TOTAL</b>	<b>2.956</b>	<b>47</b>	<b>3.003</b>	

Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2011-2016

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat

tercapai sebanyak 1 (satu) sektor/bidang usaha yaitu, *Feasibility Study* Proyek Investasi Sektor Industri (Industri Pakan Ikan).

2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Provinsi dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing dapat tercapai sebanyak 2 (dua) kali pertemuan melampaui target nasional.
3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat provinsi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian, mengikuti event/pameran promosi sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam negeri dan gelar potensi daerah sebanyak 1 (satu) kali.
4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi dengan tingkat capaian sebesar 76,29%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMPT Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2016 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.098 izin dan 7 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 2 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, dan pariwisata. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016**

NO	SEKTOR	IZIN	NON IZIN (REKOMENDASI)
1	Penanaman Modal	36	-
2	Perindustrian Dan Perdagangan	40	-
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral	269	-
4	Peternakan	-	-
5	Kesehatan	27	-
6	Pendidikan	3	-
7	Kehutanan	98	-
8	Kelautan Dan Perikanan	409	-
9	Perkebunan	1	3
10	Ketenagakerjaan	94	-
11	Pengelolaan Sumber Daya Air	7	-
12	Prasarana Jalan Tata Ruang	3	-
13	Pariwisata	-	-
14	Perhubungan	102	2
15	Lingkungan Hidup	9	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.098</b>	<b>7</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.105</b>	

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2016

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha. Sudah dilaksanakan pertemuan berupa Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov/Kab/Kota dengan sumber dana dari APBD dan Bimbingan kepada dunia usaha berupa Konsinyering Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sumber dana APBN (Dekonsentrasi).
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan.

7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator *terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha* dapat tercapai melebihi target nasional yaitu sebanyak 2 (dua) kali.

## **II. DOKUMEN PERENCANAAN**

### **A. RENSTRA**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dibunyikan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inovatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penanaman modal daerah.
- b. Memberi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai visi dari pelaksanaan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- c. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- d. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- f. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### **VISI**

Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

### **" MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK, UNGGUL DAN BERDAYASAING "**

Adapun makna pokok yang terkandung dalam visi yang ingin dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di atas, adalah:

- a. **Tujuan investasi yang menarik**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di masa mendatang.

- b. **Unggul**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi yang berkualitas melalui serangkaian pendekatan yang inovatif dan professional.
- c. **Berdayasaing**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan dan keunikan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

Visi diatas merupakan kebutuhan bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan SKPD penunjang dan juga dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan bagi publik. Pada saat sekarang permasalahan tatanan pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan instansi dengan mengembangkan seluruh potensi pembangunan di daerah.

### **MISI**

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Sumatera Barat.

Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Visi dan Misi Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat sudah mendukung visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yakni pada misi kedua **“Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”**.

## B. RENJA TAHUNAN

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Badan.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal sesuai kewenangan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2016 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 Kegiatan);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (9 Kegiatan);
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan);
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan);
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan);
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (19 Kegiatan);
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (3 kegiatan).

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKPM & PPT Tahun 2016 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.205.748,-	12 kegiatan
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	808.506.500,-	9 kegiatan
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.320.000,-	1 kegiatan

IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.922.000,-	1 kegiatan
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	274.928.752,-	4 kegiatan
VI.	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.788.798.000,-	19 kegiatan
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	670.060.000,-	3 kegiatan
<b>JUMLAH</b>		<b>8.838.488.705,-</b>	<b>49 kegiatan</b>

Sumber : Renja BKPM & PPT Tahun 2016

### III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.838.488.705,- yang terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.308.747.705,-**

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 3.144.161.727,-
- Tambahan Penghasilan PNS: Rp. 1.146.075.978,-

**b. Belanja Langsung : Rp. 4.529.741.000,-**

Terdiri dari : 7 Program dan 49 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Program dan Anggaran BKPM & PPT**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016**

NAMA KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.205.748,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	808.506.500,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.320.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.922.000,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	274.928.752,-
6.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.788.798.000,-
7.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	670.060.000,-
<b>Total</b>		<b>8.838.488.705,-</b>

**B. KEGIATAN TAHUN 2016**

Kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>80.205.7488,-</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	21.665.000 ,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	172.709.000 ,-

3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87.750.000 ,-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.000.000 ,-
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000 ,-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000 ,-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.900.000 ,-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000 ,-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.064.500 ,-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	195.000.000 ,-
11	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	68.328.500 ,-
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	15.000.000 ,-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>808.506.500,-</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	440.000.000 ,-
2	Pengadaan Mebeuler	61.000.000 ,-
3	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	18.550.000 ,-
4	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	55.300.000 ,-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000 ,-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	70.000.000 ,-
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.500.000 ,-
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler	6.000.000 ,-
9	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	25.000.000 ,-
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>31.320.000,-</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	31.320.000,-
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>147.922.000,-</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.922.000,-
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>274.928.752,-</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.900.000 ,-
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	62.308.752 ,-
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	171.300.000 ,-

4	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	24.420.000 ,-
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>1.788.798.000,-</b>
1	Penyelesaian Permasalahan Investasi	79.000.000 ,-
2	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	44.300.000 ,-
3	Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	24.992.300 ,-
4	Forum Investasi Sumatera Barat	33.000.000 ,-
5	Penyusunan Insentif Penanaman Modal	15.100.000 ,-
6	Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat	80.000.000 ,-
7	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	108.007.700 ,-
8	Penyelenggaraan Promosi Investasi	433.594.000 ,-
9	Gelar Potensi dan Temu Usaha	140.796.000 ,-
10	Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan UMKMK	66.700.000 ,-
11	Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha	39.006.000 ,-
12	Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	62.300.000 ,-
13	Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi	100.000.000 ,-
14	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat	146.940.000 ,-
15	Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri	209.062.000 ,-
16	Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi	40.000.000 ,-
17	Koordinasi Promosi dan Misi Investasi	50.000.000 ,-
18	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	86.000.000 ,-
19	Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota	30.000.000 ,-
<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	<b>670.060.000 ,-</b>
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	520.060.000 ,-
2	Forum PTSP	50.000.000 ,-
3	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat	100.000.000 ,-
<b>JUMLAH</b>		<b>8.838.488.705,-</b>

### **C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 808.205.748,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 755.527.216,- atau 93,48%.

Kelebihan Anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dikarenakan kecilnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

##### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

###### **Keluaran:**

Terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

###### **Hasil:**

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib pelayanan administrasi perkantoran.

##### **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

###### **Keluaran:**

terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan yang online selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

###### **Hasil:**

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet.

##### **3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

###### **Keluaran :**

Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 1 tahun, dengan capaian kinerja adalah 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor.

**4. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

**Keluaran :**

Tersedianya Alat Tulis Kantor kantor selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

**Keluaran :**

Tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya pelayanan administrasi perkantoran.

**6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**Keluaran :**

Tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya kegiatan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

**7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini adalah 4 unit AC 2 PK, 1 Unit AC 1 PK, 3 Unit Tabung Racun, dan 2 unit Filling Cabinet yang akan meningkatkan kenyamanan kerja PNS BKPM & PPT, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Meningkatnya kenyamanan kerja PNS BKPM & PPT.

**8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

**Keluaran :**

Tersedianya biaya untuk langganan surat kabar selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur.

**9. Penyediaan Makanan dan Minuman**

**Keluaran :**

Tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah**

**Keluaran :**

Tersedianya anggaran untuk perjalanan kedinasan selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Hasil Dari kegiatan ini dalam rangka peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor**

**Keluaran :**

Tersedianya tenaga pengaman kantor BKPM & PPT selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil :**

Hasil kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

**12. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

**Keluaran :**

Terlaksananya wirid pengajian dan senam di kantor BKPM & PPT selama 1 tahun.

**Hasil :**

Terbinanya mental dan fisik aparatur.

**B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar Rp. 808.506.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 686.940.484,- atau 84,96%.

Kelebihan Anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer, Kegiatan Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dikarenakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya anggaran yang tidak bisa dicairkan sehubungan dengan penundaan DAU.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

#### **1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

**Keluaran:**

Dari kegiatan ini diperoleh 1 unit kendaraan dinas/operasional double gardan yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKPM & PPT, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Meningkatnya kinerja dan pelayanan BKPM & PPT.

#### **2. Pengadaan Mebeuler**

**Keluaran:**

Dari kegiatan ini diperoleh 10 buah meja kerja staf berikut dengan 10 kursi kerjanya serta lemari arsip sebanyak 4 buah yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKPM & PPT, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Meningkatnya ketersediaan sarana mebeuler kantor sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan BKPM & PPT.

#### **3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

**Keluaran:**

Dari kegiatan ini diperoleh 7 unit PC, 7 unit UPS, 3 unit laptop, 6 unit printer yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKPM & PPT, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Meningkatnya kinerja dan pelayanan BKPM & PPT.

#### **4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

**Keluaran:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat komunikasi berupa telephone PABX 1 set, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran sarana komunikasi dan informasi di lingkungan BKPM & PPT.

**5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

**Keluaran:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja PNS di lingkungan BKPM & PPT.

**6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

**Keluaran:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (5 unit mobil dan 2 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas.

**7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Keluaran:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

**8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelieer**

**Keluaran:**

Terpeliharanya meja, kursi dan mebel kantor lainnya selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan meubelieer kantor.

**9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

**Keluaran:**

Tersusunnya pelaporan asset SKPD selama 1 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Hasil:**

Terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD.

### **C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 31.320.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.320.000,- atau 100%.

Rincian realisasi untuk kegiatan program peningkatan disiplin aparatur ini sebagai berikut:

#### **1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

##### **Keluaran:**

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS BKPM & PPT, dengan capaian kinerja 100%.

##### **Hasil:**

Meningkatnya kinerja aparatur BKPM & PPT.

### **D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 147.922.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 147.777.000,- atau 99,90%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

#### **1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

##### **Keluaran:**

Terlaksananya pengiriman PNS pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam bertugas selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

##### **Hasil:**

Meningkatnya profesional PNS di bidangnya.

### **E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar Rp. 274.928.752,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 243.863.750,- atau 88,70%.

Kelebihan Anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Penatausahaan Keuangan SKPD karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan

adanya anggaran yng tidak bisa dicairkan sehubungan dengan penundaan DAU.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

**1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

**Keluaran:**

Outputnya adalah laporan terkait akuntabilitas kinerja, seperti perjanjian kinerja, bahan LKPJ Gubernur, LPPD, Laporan Kinerja dan lain sebagainya dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya kinerja SKPD BKPM & PPT.

**2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD**

**Keluaran:**

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

**3. Penatausahaan Keuangan SKPD**

**Keluaran:**

Tersedianya laporan bulanan dan honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara), dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan**

**Keluaran:**

Tersedianya laporan Triwulan, Semester dan Tahunan, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar Rp. 1.788.798.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.633.419.948,- atau 91,31%.

Kelebihan Anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi, Forum Investasi Sumatera Barat, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha, Penyusunan *Feasibility Study* Proyek Sektor Industri, Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi, Koordinasi Promosi dan Misi Investasi, Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya anggaran yang tidak bisa dicairkan sehubungan dengan penundaan DAU.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

### **1. Penyelesaian Permasalahan Investasi**

#### **Keluaran:**

Terfasilitasinya permasalahan sebanyak 9 perusahaan PMA/PMDN dari 4 perusahaan yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 225% dan pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan sesuai target yang ditetapkan sebanyak 4 perusahaan atau sebesar 100%.

#### **Hasil:**

Hasil yang dicapai dari kegiatan penyelesaian permasalahan Investasi ini adalah tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN sebanyak 8 perusahaan atau sebesar 267% dari 3 perusahaan atau 90% yang ditargetkan. Capaian target kinerja kegiatan ini jauh melampaui target yakni sebesar 296,30%.

### **2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal**

#### **Keluaran:**

Terlaksananya Sosialisasi terkait dengan kebijakan dan regulasi penanaman modal kepada 85 orang peserta sesuai target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

#### **Hasil:**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman akan kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal oleh aparaturnya provinsi, kab/kota, dunia usaha serta tokoh masyarakat.

### **3. Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

#### **Keluaran:**

Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan tentang pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN sebanyak 60 perusahaan PMA/PMDN, dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

#### **Hasil:**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman perusahaan PMA/PMDN terkait tentang begitu pentingnya pengisian dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atas investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan PMA/PMDN.

### **4. Forum Investasi Sumatera Barat**

#### **Keluaran:**

Terlaksananya 1 (satu) pertemuan dengan sebanyak 50 orang peserta lintas SKPD dalam rangka mengatasi permasalahan investasi di Sumatera Barat dari target 2 (dua) kali pertemuan dengan 100 orang peserta, sehingga capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65%.

#### **Hasil:**

Diperolehnya 1 (satu) solusi terhadap permasalahan investasi di Sumatera Barat dari 2 (dua) solusi yang diharapkan karena berhalangan hadirnya Narasumber dari BKPRN Pusat.

### **5. Penyusunan Insentif Penanaman Modal**

#### **Keluaran:**

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dengan tingkat capaian kinerja 100%.

#### **Hasil:**

Adanya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi investor di Provinsi Sumatera Barat.

### **6. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat**

#### **Keluaran:**

Tersusunnya buku data perkembangan penanaman modal Sumatera Barat tahun 2015/2016 sebanyak 100 buah buku, dengan tingkat capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Tersedianya data perkembangan realisasi investasi, fasilitas dan non fasilitas di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga bisa dijadikan bahan pengambil kebijakan bagi stakeholders dan dunia usaha.

**7. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal****Keluaran:**

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal terhadap 12 (dua belas) perusahaan PMA/PMDN, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Hasil dari kegiatan ini adalah penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kemudahan pengurusan IUT dan terlaksananya pencabutan Surat Persetujuan bagi 10 (sepuluh) perusahaan yang macet, sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

**8. Penyelenggaraan Promosi Investasi****Keluaran:**

Terwujudnya keikutsertaan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan promosi investasi baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan capaian kinerja 100%.

**Hasil:**

Didapatkannya calon investor yang berminat serius untuk melakukan investasi di Sumatera Barat sebanyak 12 calon investor yang berminat serius dari target sebanyak 10 calon investor yang berminat serius, dengan capaian kinerja sebesar 120%.

**9. Gelar Potensi dan Temu Usaha****Keluaran:**

Terlaksananya 1 (satu) pertemuan gelar potensi dan temu usaha yang dihadiri oleh 60 orang sesuai target, maka capaian kinerja adalah 100%.

**Hasil:**

Didapatkannya calon investor yang berminat serius untuk melakukan investasi di Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) calon investor yang berminat serius, dengan capaian sebesar 100%

## **10. Peningkatan Kerjama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK**

### **Keluaran:**

Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan Pengusaha Besar sebanyak 80 orang di Kota Padang Panjang dan Kota Solok sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, dengan capaian kinerja 100%.

### **Hasil:**

Terjadinya kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKMK sebanyak 70 (tujuh puluh) kesepakatan ( melebihi target 3 (tiga) kesepakatan, atau sebesar 2.333,33%.

## **11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha**

### **Keluaran:**

Terlaksananya fasilitasi kerjasama investasi pada 2 (dua) sektor, yaitu panas bumi dan sektor pariwisata sesuai target dan telah dilaksanakannya pertemuan dengan kabupaten/kota bidang penanaman modal, bidang pariwisata dan bidang ESDM sebanyak 2 (dua) kali pertemuan atau sebesar 100%.

### **Hasil:**

Didapatkannya rekomendasi investasi untuk tindak lanjut, yakni sektor panas bumi dan sektor pariwisata.

## **12. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal**

### **Keluaran:**

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100% sesuai target dimana diperoleh 1 (satu) unit data spasial dasar dan tematik terbaru serta 1 (satu) buah data/informasi tematik dan spasial dimana terkumpul data tentang informasi spasial energi terbarukan di wilayah kerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat.

### **Hasil:**

Tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat 1 (satu) unit tentang potensi investasi sektor energi terbarukan yang ada di kab/kota yang siap dijadikan sumber energi listrik.

## **13. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi**

### **Keluaran:**

Tersedianya Peta Investasi sebanyak 300 buah, Tas Promosi sebanyak 250 buah, Map Investasi sebanyak 200 buah dan Souvenir Eksklusif sebanyak 20 buah sesuai target.

**Hasil:**

Tersedianya bahan /materi promosi dan presentasi investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor, dengan capaian kinerja 100%.

**14. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**

**Keluaran:**

Tersusunnya direktori potensi daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat yang akan menjadi bahan informasi bagi investor sesuai dengan bidang usaha yang mereka inginkan, capaian kinerja sebesar 100%.

**Hasil:**

Memudahkan bagi investor/calon investor dalam mendapatkan data dan informasi potensi dan peluang investasi di 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**15. Penyusunan *Feasibility Study* Proyek Investasi Sektor Industri**

**Keluaran:**

Tersusunnya 1 (satu) dokumen *feasibility study* proyek sektor industri pakan ikan yang dicetak sebanyak 100 buah buku (sesuai target) dalam 2 (dua) bahasa, dengan capaian kinerja 100%

**Hasil:**

Memudahkan bagi investor/calon investor memperoleh FS Investasi sektor industri.

**16. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal**

**Keluaran:**

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) peserta sesuai target yang diharapkan, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

**Hasil:**

Terciptanya pemahaman betapa pentingnya fasilitasi dan koordinasi atas penyelesaian permasalahan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.

**17. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi**

**Keluaran:**

Terlaksananya promosi dan misi investasi dengan 9 (Sembilan) kabupaten/kota dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 128,57% dan jumlah calon investor yang

difasilitasi sebanyak 10 calon investor dapat melebihi target, yakni sebanyak 6 calon investor atau sebesar 166,67%.

**Hasil:**

Meningkatnya koordinasi promosi dan kerjasama dengan kabupaten/kota serta minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat.

**18. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal**

**Keluaran:**

Didapatnya rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian Provinsi Sumatera Barat.

**Hasil:**

Terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sesuai target, dengan demikian capaian kerjanya adalah 100%

**19. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota**

**Keluaran:**

Terlaksananya konsolidasi data realisasi investasi kabupaten/kota dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang sesuai target, dengan demikian capaian kinerja adalah 100%.

**Hasil:**

Tersusunnya data realisasi investasi kabupaten/kota yang sinkron/sama dengan data realisasi investasi Provinsi dan Nasional serta terciptanya persepsi yang sama antara aparatur bidang penanaman modal tentang kebijakan penanaman modal.

**G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 670.060.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 588.234.042,- atau 87,79%.

Kelebihan Anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya anggaran yng tidak bisa dicairkan sehubungan dengan penundaan DAU.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

## **1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **Keluaran:**

Diterbitkannya perizinan dan non perizinan sebanyak 1.105 izin/rekomendasi dari target sebanyak 600 izin/rekomendas, dengan demikian capaian kinerja adalah 184,17%, dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat atas 150 responden dengan skala IKM dengan rasio sebesar 3,18 atau angka kepuasan sebesar 79,55, Tersusunnya laporan data penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016 dan perpanjangan sertifikat ISO.

### **Hasil:**

Persentase penerbitan perizinan khusus untuk penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan SOP dari 36 izin penanaman modal yang diterbitkan semuanya sesuai dengan SOP, dengan kata lain capaian kinerja penerbitan izin khusus untuk penanaman modal 100%.

## **2. Forum PTSP**

### **Keluaran:**

Terlaksananya Forum PTSP 1 (satu) kali pertemuan dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) sesuai target, atau tercapai 100%

### **Hasil:**

Adanya penguatan kelembagaan dan pembinaan PTSP di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## **3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat**

### **Keluaran:**

Terlaksana Study Teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur PTSP di BPM Jawa Timur dan Sharing Informasi Penerapan Aplikasi Sistem Online di BPMPT Jawa Timur sebanyak 5 orang dari target 6 orang atau sebesar 83,33%, dan Diklat Penanaman Modal Tingkat Pertama Aparatur PTSP sebanyak 6 orang dari target 7 orang, dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 85,71%

### **Hasil:**

Pemahaman aparatur terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan PTSP, dan tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan kurangnya perencanaan dalam penganggaran untuk Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **D. DATA KINERJA KEUANGAN**

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

##### **A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

###### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 21.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.905.051,- atau capaian kinerja keuangan 91,88%.

###### **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik sebesar Rp. 213.681.500,- dan terealisasi sebesar Rp 180.284.714,- atau capaian kinerja keuangan 84,37%.

###### **3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 87.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp 87.256.175,- atau capaian kinerja keuangan 99,44%.

###### **4. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.641.000,- atau capaian kinerja keuangan 98,88%.

###### **5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.580.500,- atau capaian kinerja keuangan 93,24%

###### **6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.498.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,97%

**7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 62.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.583.000,- atau capaian kinerja keuangan 83,73%

**8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 13.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau capaian kinerja keuangan 90,91%

**9. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 16.064.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.680.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,61%

**10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah sebesar Rp. 234.911.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.725.318,- atau capaian kinerja keuangan 99,07%.

**11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp. 82.633.748,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.323.458,- atau capaian kinerja keuangan 99,62%

**12. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.050.000,- atau capaian kinerja keuangan 93,67%

**B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 388.676.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 388.676.500,- atau capaian kinerja keuangan 100%

**2. Pengadaan Mebeuler**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mebeuler sebesar Rp. 61.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.000.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%

**3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer sebesar Rp. 124.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.575.000,- atau capaian kinerja keuangan 14,14%

**4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 55.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.370.000,- atau capaian kinerja keuangan 92,89%

**5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%

**6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.050.284,- atau capaian kinerja keuangan 90,07%

**7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 28.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.937.200,- atau capaian kinerja keuangan 87,50%

**8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelieer**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.850.000,- atau capaian kinerja keuangan 97,50%

**9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp. 24.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.481.500,- atau capaian kinerja keuangan 98,80%

### **C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya sebesar Rp. 31.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.320.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%

### **D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 147.922.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 147.777.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,90%

### **E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 16.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.895.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,97%

#### **2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

##### **Keluaran:**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD sebesar Rp. 62.308.752,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.263.350,- atau capaian kinerja keuangan 79,06%

#### **3. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 171.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.050.000,- atau capaian kinerja keuangan 89,93%

#### **4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan sebesar Rp. 24.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.655.400,- atau capaian kinerja keuangan 96,87%

#### **F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

##### **1. Penyelesaian Permasalahan Investasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 79.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.146.400,- atau capaian kinerja keuangan 77,407%

##### **2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal sebesar Rp. 44.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.379.300,- atau capaian kinerja keuangan 97,92%

##### **3. Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 24.992.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.992.300,- atau capaian kinerja keuangan 100%

##### **4. Forum Investasi Sumatera Barat**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 33.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.058.500,- atau capaian kinerja keuangan 36,54%

##### **5. Penyusunan Insentif Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Insentif Penanaman Modal sebesar Rp. 15.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.458.000,- atau capaian kinerja keuangan 89,13%

##### **6. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.121.976,- atau capaian kinerja keuangan 92,65%

**7. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 108.007.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.179.100,- atau capaian kinerja keuangan 92,65%

**8. Penyelenggaraan Promosi Investasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi sebesar Rp. 433.594.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 431.247.404,- atau capaian kinerja keuangan 99,46%

**9. Gelar Potensi dan Temu Usaha**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha sebesar Rp. 140.796.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.620.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,16%

**10. Peningkatan Kerjama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK sebesar Rp. 66.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.679.450,- atau capaian kinerja keuangan 96,97%

**11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha sebesar Rp. 39.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.709.500,- atau capaian kinerja keuangan 83,86%

**12. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal sebesar Rp. 62.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.965.950,- atau capaian kinerja keuangan 94,65%

**13. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.693.800,- atau capaian kinerja keuangan 93,69%

**14. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 146.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.763.800,- atau capaian kinerja keuangan 95,80%

**15. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri sebesar Rp. 209.062.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.852.050,- atau capaian kinerja keuangan 86,98%

**16. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.074.291,- atau capaian kinerja keuangan 85,19%

**17. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Promosi dan Misi Investasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.842.077,- atau capaian kinerja keuangan 87,68%

**18. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 86.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.698.900,- atau capaian kinerja keuangan 96,16%

**19. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.937.100,- atau capaian kinerja keuangan 26,46%

**G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 520.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 478.293.150,- atau capaian kinerja keuangan 91,97%

**2. Forum PTSP**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Forum PTSP sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.026.000,- atau capaian kinerja keuangan 34,05%

### **3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.914.892,- atau capaian kinerja keuangan 92,91%

#### **IV. PENUTUP**

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan. Sehubungan dengan rendahnya realisasi keuangan pada beberapa kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan adanya penundaan pencairan DAU pada triwulan IV yang mengakibatkan adanya anggaran pada beberapa kegiatan yang tidak boleh direalisasikan. Demikian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2016

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**MASWAR DEDI, A.P,**

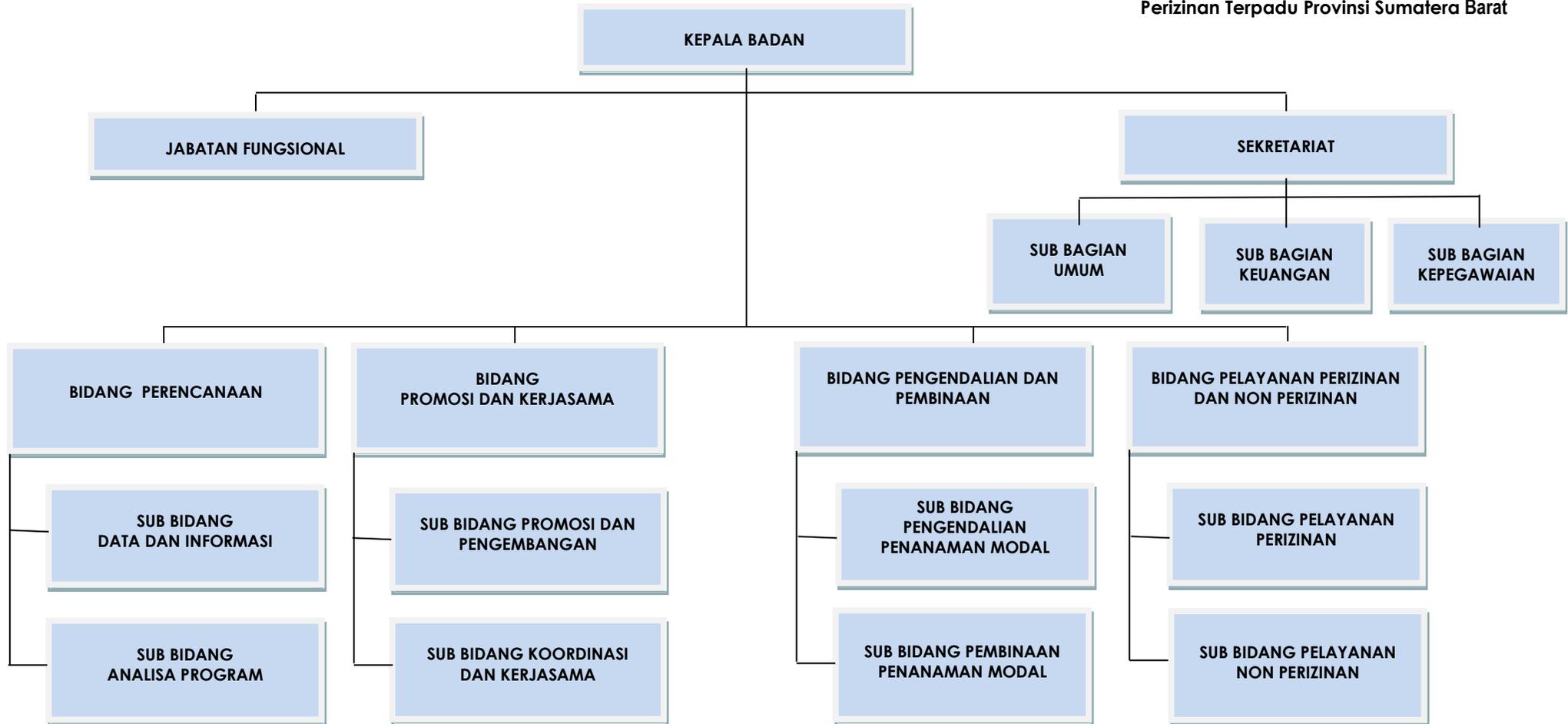
**M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP. 19740618 199311 1 001

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 10 Tahun 2014  
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat

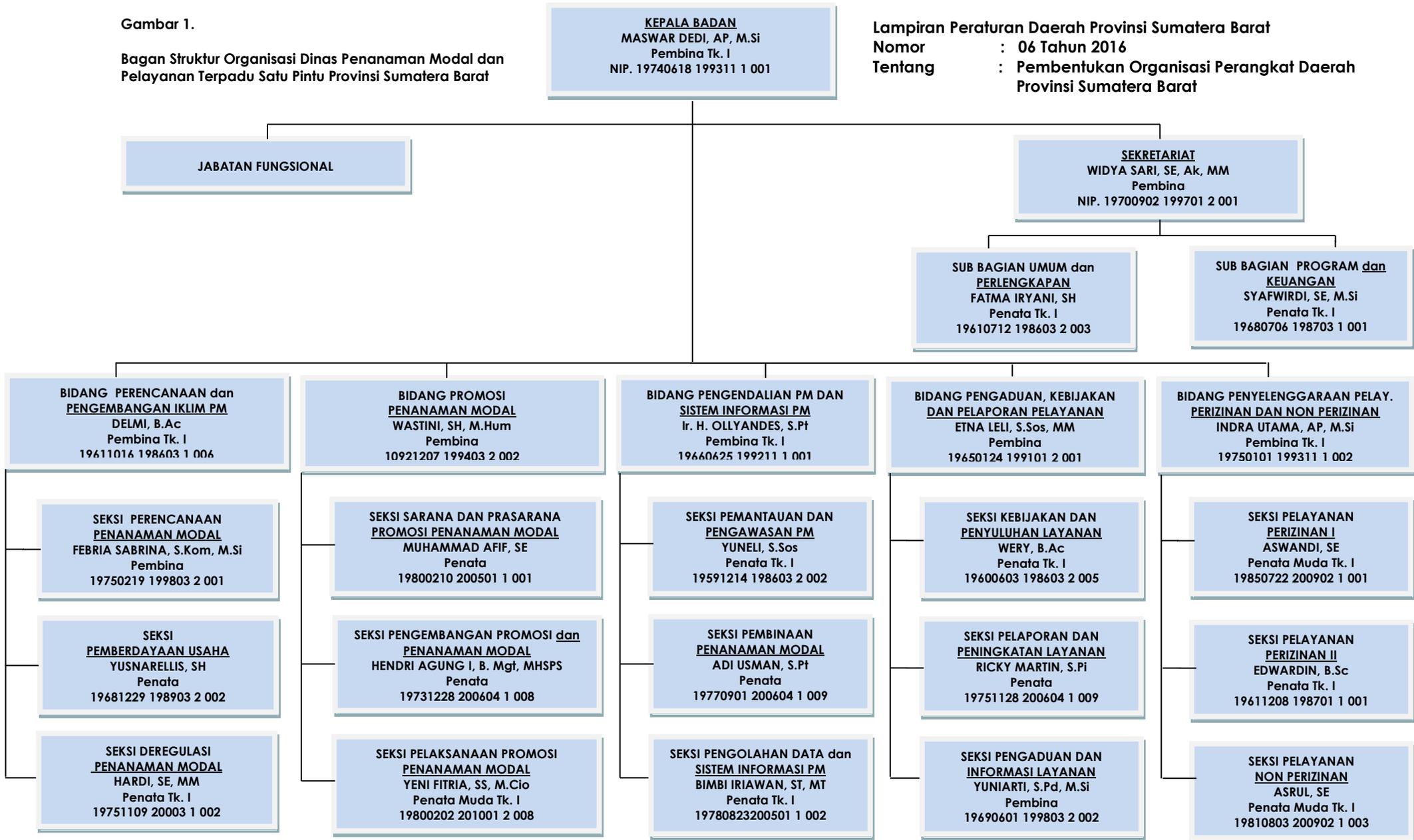


Sumber : Subag Kepegawaian BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 06 Tahun 2016  
 Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat





**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  
LAMPIRAN 1**

No.	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	DOKUMENTASI PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, pos, bagian humas, leaflet/brosur)	1. Website  2. Leaflet/Brosur	1. 2 Media informasi	Print Out Halaman depan Web	BIRO HUMAS
39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2016	Persetujuan investasi pada Tahun 2016, sebanyak 96 persetujuan terdiri dari :  PMDN : 76 persetujuan PMA : 20 persetujuan  Total Nilai Investasi : PMDN : Rp. 3.795.575,50 juta PMA : US \$ 79..268,10 ribu	96 persetujuan	BKPM&PPT

KEPALA DPM & PTSP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740618 199311 1 001

**LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

**PROVINSI :** SUMATERA BARAT

**NAMA SKPD :** BKPM DAN PPT

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** PENANAMAN MODAL

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</li> <li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li> </ul>	33 %	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 57 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Pengelolaan Surat Masuk</li> <li>2. SOP ttg Pengelolaan Surat Keluar</li> <li>3. SOP ttg Pengelolaan Kebersihan Dst -----</li> </ol>	Ada 49 SOP	Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKPM &PPT Provinsi Sumatera Barat No. 504/35/bkpm & PPT/2016 Tgl. 1 September 2016
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 3.</li> <li>- PERDA yang seharusnya 3</li> </ul>	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda ttg. Penanaman Modal</li> <li>- Peraturan Gubernur ttg. RUPM</li> <li>- Peraturan Gubernur ttg. Retribusi</li> </ul>

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang terisi sebanyak 24</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 24</li> </ul>	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 org kepala DPM &amp; PTSP eselon II.a</li> <li>- 1 org sekretaris dan 5 org kepala bidang eselon III.a</li> <li>- 2 org kasubag dan 15 org kasi eselon IV.a</li> </ul> Susunan jabatan struktural terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	-	-	-
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 59 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi ..... personil</li> </ul>	.....	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.</li> </ul>	100 %	Pejabat yg memenuhi syarat diklatpim : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 org pejabat eselon II.a Belum diklatpim II</li> <li>- 4 org pejabat eselon III.a sdh diklatpim III dan 2 org belum diklatpim III</li> </ul>

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- 12 org pejabat eselon IV.a sudah diklatpim IV dan 5 org belum diklatpim IV
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 24 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.</li> </ul>	100 %	Pangkat dan Jabatan terlampir
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program</li> </ul>	100 %	<b>7 Program pada Renja DPM &amp; PTSP:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana</li> <li>3. Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> </ol>

								<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu</li> </ol> <p><b>7 Program pada RPJMD :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana</li> <li>3. Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu</li> </ol>
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.</li> </ul>	100 %	Program pada RENJA RKPD sama dengan Program RKA OPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.</li> </ul>	100 %	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 8.838.488.705,-</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.201.135.376.736,70</li> </ul>	0,21 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 684.026.500,-</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.838.488.705</li> </ul>	7,74 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 154.500.000,-</li> <li>- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.845.714.500</li> </ul>	4,02 %	Sesuai dengan laporan keuangan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 154.500.000</li> <li>- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.838.488.705</li> </ul>	1,77 %	Sesuai dengan laporan keuangan
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan Keuangan ada, dengan 5 komponen, yaitu : 1.LRA 2.LO 3. Neraca 2. LPE 3. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	Laporan Keuangan hanya 1 jenis dengan 5 komponen di dalamnya, yakni : 1.LRA 2.LO 3. Neraca 2. LPE 3. CaLK
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Buku Rekapitulasi aset	Ada	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2016
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 108.725.675,-</li> <li>- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.022.926.221</li> </ul>	3,60 %	Sesuai dengan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2016

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Kotak Saran 4. Layanan Pengaduan	Jumlah sebanyak 4 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat BKPM&PPT	3,18	

Padang, Pebruari 2016  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, A.P, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740618 199311 1 001

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

## PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
	<b>Penanaman Modal</b>	<b>32</b>	Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMA (dalam ribu dollar)	$\frac{\text{Realisasi PMA th 2016} - \text{Realisasi PMA th 2015}}{\text{Realisasi PMA th 2015}} \times 100\%$ $= \frac{79.268,10 - 39.754,32}{39.754,32} \times 100\% = 99,39\%$	99,39 %	
			Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMDN (dalam juta rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN th 2016} - \text{Realisasi PMDN th 2015}}{\text{Realisasi PMDN th 2015}} \times 100\%$ $= \frac{3.795.575,50 - 3.185.075,82}{3.185.075,82} \times 100\%$	19,17 %	

KEPALA DPM & PTSP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740618 199311 1 001